….……..…………….., …………. 20…

Nomor : ………………………………………….

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Pemenuhan

 Komitmen Izin Usaha Perkebunan

 yang Terintegrasi antara Budidaya

 dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan(IUP)

 A.n PT. ……………………………………………….

Kepada Yth,

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan

 Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP)

 Kabupaten Rokan Hilir

 di-

 Bagansiapiapi

 Dengan hormat,

Bersama surat ini PT. ......……………………………………………….yang berlokasi di Kepenghuluan/Kelurahan…………………………..Kecamatan……………………………………..

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan ini mengajukan Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP) dan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan Perubahan yang telah terdaftar di

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komposisi Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahan;

 2 Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur;

 3. Izin Lokasi dan Izin Lingkungan yang sudah Berlaku Efektif dari OSS;

 4. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum

 dalam lampiran IV pada Permentan 98/2013 dan lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;

 5. Pernyataan kesedian untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran XIII pada permentan 98/2013 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini;

 6. Surat pernyataan kesanggupan:

1. Rencana kerja pembangunan kebun inti;
2. Rencana pengolahan hasil;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme pengganggu Tumbuhan (OPT);
4. Memilki sumber daya manusia, sarana, prasana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
5. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.(Lampiran X Permentan 98/2013)

 7. Pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum

 adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada diatas tanah hak ulayat, telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat;

 8. Keterangan mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership) usaha perkebunan;

 9. Fotocopy sertifikat bukti kepersertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

 10. Nomor Induk Berusah (NIB), Izin Usaha Perkebunan dan Izin Usaha Industri dari OSS KBLI 01262 dan 10431;

 11. Hak Guna bangunan (HGB) Lunas PBB P-3;

 12. Peta Digital Shape File (Shp) untuk Izin Lokasi dan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) dengan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu)

 13. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

 14. Pas foto ukuran 3x4 berwarna sebanyak 4 lembar, materai Rp. 10.000,- 2 lembar serta berkas di fotokopi rangkap 1 (satu) jika sudah lengkap.

 Demikian permohonan IUP-P ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

 Hormat kami,

Direktur PT……………………………………

 Materai Rp. 10.000,-

 ( nama jelas)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : …………………………………………………………………

Jabatan : …………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………

Bertindak untuk dan atas nama PT. ………………………………………….. yanga akan membangun kebun di wilayah desa/kelurahan……………………………………kecamatan……………………………….kabupaten Rokan Hilir dengan jenis komoditi …………………………………..seluas……………………………ha, menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memilki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan perlindungan tanaman dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dilokasi usaha perkebunan di atas;
2. Memiliki sumber daya manusia sesuai keahlian yang diperlukan, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaaan lahan tanpa pembakaran serta melakukan pengendalian kebakaran di lokasi usaha perkebunan di atas;
3. Memfasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan membangunan kebun bagi masyarakat sekitar berlokasi di Kabupaten Rokan Hilir dengan jenis komoditi kebun kelapa sawit seluas…………….ha dengan pola (kredit, bagi hasil atau pola plasma)dan
4. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan melalui salah satu atau beberapa pola sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian dengan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian antara PT. ………………………………………dengan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh bupati.

Apabila kesanggupan sebagaimana tercantum dalam butir 1 sampai 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan, maka pemberi izin dapat membatalkan izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 ……………………………………….., ……………………………..20….

 Materai Rp. 10.000,-

 (nama jelas)

Lampiran X

(Permentan 98/2013)

SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Pada hari ini………………tanggal……………bulan…………………tahun……………………, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………………………………………………

Jabatan : ……………………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………...

NPWP : ………………………………………………………………

Bertindak untuk dan atas nama PT…………………………………yang selanjutnya disebut

PIHAK KESATU

Nama : ………………………………………………………………

Jabatan : ……………………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………...

NPWP : ………………………………………………………………

Bertindak untuk dan atas nama PT…………………………………yang selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Selanjutnya atas dasar kesepakatan bersama, para pihak dengan ini sepakat untuk membuat

perjanjian kemitraan dalam hal pasokan bahan baku tanaman pangan dengan syarat-syarat

sebagai berikut:

pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
2. Menerima bahan baku dari pihak kedua yang volume, mutu, frekwensi dan waktunya sesuai dengan kesepakatan;
3. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
4. Bersama-sama dengan Dinas Terkait memberikan pembinaan teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen…..dsb.
5. PIHAK KESATU mempunyai hak :
6. Menolak bahan baku yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati;
7. Mendapatkan mutu bahan baku yang sesuai dengan yang telah disepakati;
8. dsb…………………………..
9. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
10. Memberikan bahan baku dari pihak pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktunyasesuai dengan kesepakatan;
11. Melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan bahan baku teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
12. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik permanenan yang benar
13. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
14. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakti bersama.

 Pasal 2

SANKSI

1. Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), maka…………………………….(ditentukan bersama oleh para pihak)
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), maka…………………………………….(ditentukan bersama oleh para pihak)

 Pasal 3

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku paling kurang selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditiinjau kembali paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

 Pasal 4

Evaluasi atau penilaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secara berlaku setiap………….bulan/tahun sekali.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan pihak Pemerintahan Kabupaten sebagai mediator.
3. Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Kabupaten tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Ujung Tanjung kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 6

 Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bernaterai cukup dimana semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh pihak dengan instansi terkait.

 PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

(………………………………………...) (………………………………………………)

Mengetahui,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Rokan Hilir

 (nama jelas)

 Pangkat/Gol

 NIP.19………………….

Lampiran IV

Permentan 98/2013

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ……………………………………………………

Jabatan : …………………………………………………..

Alamat : …………………………………………………..

Berindak untuk dan atas nama PT……………………………………… yang akan membangun kebun di wilayah Kepenghuluan/kelurahan………………………………..Kecamatan………………………………..Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan jenis komoditi kelapa sawit seluas……………..ha, menyatakan kesanggupan untuk melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan berupa kemitraan: penyedian sarana produksi/produksi/pengolahan dan pemasaran/transportasi/operasianal/kepemilikan saham/jasa pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan ini akan dibuat dalam bentuk perjanjian antara PT…………………………………..dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan yang diketahui oleh Bupati.

Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan izin usaha perkebunan, kami belum melakukan kemitraan seperti dimaksud dalam pernyataan ini, pemberi izin dapat membatalkan izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan tanpa pemberian ganti rugi.

 Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 ………………………………………., ………………….20….

Yang Menyatakan,

PT. ……………………………….

 (nama jelas)

 Jabatan

Lampiran XIII

permentan 98/2013

SURAT PERNYATAAN

JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN……...............

Kami bertanda tangan di bawahini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. ………............................. yang akan membangun Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) di wilayah kepenghuluan/kelurahan………………. Kecamatan………………………….. Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menyatakan bahwa industri pengolahan dengan kapasitas……………..ton/jam, peyediaan bahan bakunya bersumber dari :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sumber Bahan Baku | Lokasi bahan baku(Kep/Kel/Kec/Kab) | Luas Kebun(Ha) | Volume (satuan) |
| 1 | Kebun Sendiri |  |  |  |
| 2 | Perkebunan besar lainnya (PT.......................................) |  |  |  |
| 3 | Koperasi |  |  |  |
| 4 | Kelompok Tani |  |  |  |

Terlampir disampaikan perjanjian dengan masing – masing sumber bahan baku di atas.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 …………………………., …………….……….. 20….

Yang Menyatakan,

PT. ……………………………….

 (nama jelas)

Lampiran XII jabatan

Permentan 98/2013